

Perkembangan Provinsi Indonesia 1945–2025: Dari 8 Menjadi 38

21 Agustus 2026 • Artikel, Simulasi

Pelajari perubahan wilayah provinsi Indonesia sejak 1945 hingga 2025 melalui peta waktu interaktif, video, dan ringkasan peristiwa penting.



Wilayah administratif Indonesia tidak terbentuk sekaligus seperti yang kita kenal sekarang. Ketika Republik Indonesia baru berdiri pada 1945, wilayahnya dibagi menjadi delapan provinsi. Setelah itu, pemekaran, penggabungan, perubahan nama, dan perubahan status wilayah terus membentuk peta Indonesia.

Video berikut memperlihatkan cara menjelajahi perubahan tersebut melalui peta waktu **Pemekaran Provinsi Indonesia 1945–2025**. Geser tahunnya, lalu perhatikan perubahan batas wilayah, jumlah provinsi, dan catatan peristiwa yang muncul.

Video di artikel ini

[Tonton di versi web artikel →](#)

Video demonstrasi berdurasi 1 menit 21 detik dan disajikan tanpa audio. Ikuti teks serta perubahan yang tampak pada layar.

Coba fitur pembelajaran Simu

Ingin mencoba peta dan fitur pembelajaran lainnya? Buka [halaman Fitur Simu](#). Fitur dapat digunakan gratis oleh pengguna yang sudah menjadi member.

Delapan provinsi pada awal kemerdekaan

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembagian awal wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi:

1. Sumatra
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Sunda Kecil
6. Kalimantan
7. Sulawesi
8. Maluku

Pembagian ini masih sangat luas. Satu provinsi dapat mencakup wilayah yang sekarang telah menjadi beberapa provinsi berbeda. Karena itu, peta 1945 terlihat jauh lebih sederhana daripada peta masa kini.

Mengapa jumlah provinsi terus berubah?

Pemekaran provinsi bukan sekadar menggambar garis baru pada peta. Pembentukan daerah baru dilakukan melalui undang-undang dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, rentang kendali, serta kondisi geografis dan sosial suatu wilayah.

Perjalanan itu tidak selalu bergerak lurus. Ada wilayah yang dimekarkan, berganti nama, berubah status, atau tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia. Timor Timur, misalnya, pernah dihitung sebagai provinsi Indonesia sejak 1976, kemudian berpisah dari Indonesia setelah jajak pendapat 1999. Karena itu, jumlah provinsi pada garis waktu dapat naik maupun turun.

Tahap penting perubahan peta provinsi

1945: Indonesia dimulai dengan 8 provinsi

Delapan provinsi awal menjadi kerangka pemerintahan daerah pada masa awal Republik. Dalam tahun-tahun berikutnya, perubahan bentuk negara dan penataan pemerintahan membuat pembagian wilayah ikut disesuaikan.

1950-an hingga 1960-an: provinsi besar mulai dipecah

Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil kemudian dibagi menjadi provinsi-provinsi yang lebih kecil. Pada masa ini pula muncul berbagai provinsi baru yang saat ini sudah akrab, antara lain Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Perubahannya tidak terjadi serentak. Setiap daerah memiliki dasar hukum dan waktu pembentukan masing-masing. Itu sebabnya pilihan tahun pada peta penting: peta tahun 1950 belum tentu sama dengan peta tahun 1958 atau 1964.

1976–1999: periode Timor Timur

Timor Timur menjadi provinsi Indonesia pada 1976. Setelah jajak pendapat 1999 dan proses transisi berikutnya, wilayah tersebut kemudian berdiri sebagai negara Timor-Leste. Peristiwa ini menjelaskan mengapa jumlah provinsi Indonesia pernah berkurang.

1999–2012: gelombang pemekaran setelah Reformasi

Setelah Reformasi, pemekaran daerah berlangsung lebih cepat. Sejumlah provinsi baru terbentuk, termasuk Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara dibentuk pada 2012 dan menjadi provinsi ke-34. Jumlah 34 provinsi bertahan selama beberapa tahun, termasuk pada keadaan yang ditampilkan peta untuk 2021.

2022–2025: empat provinsi baru di wilayah Papua

Pada 2022, empat provinsi baru dibentuk di wilayah Papua:

- **Papua Selatan**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022;
- **Papua Tengah**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022;
- **Papua Pegunungan**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022; dan
- **Papua Barat Daya**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.

Dengan pembentukan empat provinsi tersebut, Indonesia memiliki **38 provinsi**. Jumlah inilah yang berlaku pada peta tahun 2025.

Cara membaca peta waktu dengan lebih teliti

Saat menggunakan peta interaktif, jangan hanya melihat angka jumlah provinsi. Lakukan tiga pengamatan berikut:

1. **Bandingkan bentuk wilayah.** Cari provinsi lama yang wilayahnya dahulu jauh lebih luas.
2. **Baca peristiwa pada tahun terpilih.** Catatan peristiwa membantu menjelaskan mengapa batas atau jumlah provinsi berubah.
3. **Perhatikan perubahan yang tidak berupa pemekaran.** Pergantian nama, perubahan status, dan keluarnya Timor Timur juga memengaruhi cara kita membaca peta.

Cobalah membandingkan tahun **1945, 1964, 1999, 2012, 2021, dan 2022**. Enam titik waktu ini memperlihatkan perubahan besar tanpa harus memeriksa setiap tahun satu per satu.

Ide kegiatan belajar di kelas

Peta waktu ini dapat digunakan dalam pelajaran IPS, geografi, sejarah, atau Pendidikan Pancasila. Guru dapat meminta siswa bekerja berpasangan untuk menjawab pertanyaan berikut:

- Provinsi masa kini mana saja yang dahulu menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil?
- Mengapa jumlah provinsi tidak selalu bertambah?
- Provinsi mana yang paling baru dibentuk?
- Apa perbedaan peta Indonesia pada 2021 dan 2022?
- Mengapa kondisi geografis Indonesia dapat memengaruhi pembentukan daerah administratif?

Untuk tugas lanjutan, pilih satu provinsi dan telusuri provinsi induknya, tahun pembentukannya, dasar hukumnya, serta perubahan nama yang pernah terjadi.

Ringkasan

Perkembangan provinsi Indonesia menunjukkan bahwa peta administratif adalah hasil proses sejarah dan hukum yang panjang. Indonesia bermula dengan delapan provinsi pada 1945, mengalami berbagai pemekaran dan perubahan wilayah, memiliki 34 provinsi pada 2012–2021, lalu menjadi 38 provinsi setelah pembentukan empat provinsi baru di wilayah Papua pada 2022.

Dengan menggunakan garis waktu, siswa tidak hanya menghafal nama provinsi. Mereka dapat melihat hubungan antara tahun, peristiwa sejarah, dasar hukum, dan perubahan wilayah secara langsung.

Sumber

- Portal Informasi Indonesia, “Profil Provinsi”
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Belajar lebih seru dengan simulasi interaktif

Simu punya ratusan simulasi interaktif Kurikulum Merdeka yang berjalan langsung di browser — tanpa instal apa pun. Jelajahi katalognya di simu.konsep.com/simulasi.

Mulai dengan akun gratis

Akun gratis membuka katalog lengkap, simulasi & materi yang bertanda terbuka, serta soal dan jawaban di tiap bab kurikulum.

simu.konsep.com/register

Ingin semua simulasi terbuka? Lihat paket berlangganan di simu.konsep.com/pricing

Artikel ini tersedia daring di simu.konsep.com/artikel/perkembangan-provinsi-indonesia-1945-2025